



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN INKLUSIF KEUANGAN DAN HIJAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANASTUTY KUSUMOWARDHANI
2. Jabatan : KEPALA DEPARTEMEN
3. NHK : 217043

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **16.619.697.000**

1. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 219.000.000
2. Bangunan Seluas 37 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000
3. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 219.000.000
4. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 219.000.000
5. Bangunan Seluas 91 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 1.042.697.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 361 m2/303 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.170.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **800.000.000**

1. LAINNYA, BROMPTON SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000



2. MOBIL, MERCEDES E CLASS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
350.000.000
3. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
260.000.000
4. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.160.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	5.359.608.653
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.648.143.656
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	29.587.449.309

III. HUTANG Rp. 1.552.590.749

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 28.034.858.560

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.